1

Konflik Politik Pasca Pemilu 2011 Di Nigeria (Politic Conflict After 2011 Election In Nigeria)

Fradana Anantara Yunif; Drs. Sugiyanto E.K, MA., Ph.D; Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jl. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Pemilu 2011 diadakan pemerintah Nigeria untuk memilih presiden sebagai pengganti presiden Umaru Yar'Adua yang meninggal dunia karena sakit. Hasil pemilu 2011 akhirnya menghasilkan Goodluck Jonathan sebagai pemenang dengan perolehan suara mencapai 59 persen mengungguli pesaing muslim dari wilayah utara Muhammadu Buhari yang hanya meraih 32 persen suara. Namun, Buhari menuding kemenangan Jonathan ini sarat kecurangan. Maka, sebagai aksi protes, para pendukung Buhari mengobarkan kekerasan di beberapa negara bagian di Nigeria utara, melukai dan menewaskan ratusan orang. Muhammadu Buhari dan pendukungnya mempermasalahkan hasil pemilu, pasalnya ada perbedaan yang tajam dalam perhitungan suara di wilayah utara dan selatan. Menurut teori konflik internal dari Michael E Brown, konflik politik di Nigeria ini dipicu oleh faktor terpilihnya Goodluck Jonathan sebagai presiden pada pemilu 2011, padahal seharusnya menurut kesepakatan antara beberapa partai politik disana, calon yang menjadi penyebab konflik politik di Nigeria, seperti struktur, politik, sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Nigeria, Pemilu, Konflik

Abstract

The election of 2011 in Nigeria was held to elect the president of the Nigerian government in lieu of president Umaru Yar'Adua, who died due to his illness. The 2011 election results finally produced Goodluck Jonathan as the winner with 59 percents of the votes ahead of his rival Muslim Muhammadu Buhari from the northern region which only won 32 percents of the votes. However, Buhari accused Jonathan's victory was laden of cheating. So, in protest, supporters of Buhari fomented violence in some states in northern Nigeria, injuring and killing hundreds of people. Muhammadu Buhari and his supporters disputed election results, the problem is there was a sharp difference in the counting of votes in the north and south regions. According to the theory of the internal conflict of Michael E Brown, the political conflict in Nigeria is triggered by factors, such as the election of President Goodluck Jonathan in the 2011 elections. When according to the agreement of several political parties in Nigeria, the presidential candidate who serve as the president of Nigeria replacing Umaru Yar'Adua should be of the Muslim group, instead of Goodluck Jonathan of the christian group. Beside, there are several other factors that cause political conflicts in Nigeria, as structures, political, social and economic as well.

Keywords: Nigeria, Election, Conflict.

Pendahuluan

Nigeria merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada 1 oktober 1960. Negara yang terletak di bagian barat Afrika ini, mempunyai banyak kelompok etnis dan bahasa, yaitu sebanyak 250 kelompok etnis (Igbo, Yoruba dan Hausa yang terbesar) dan 120 bahasa yang masih dipergunakan. Sebanyak 50 persen penduduk Nigeria memeluk agama Islam, 40 persen beragama Kristen, dan 10 persen sisanya beragama lain. Umat muslim mayoritas bermukim di wilayah utara, sedangkan umat Kristen menempati wilayah selatan. Pembagian wilayah ini dimulai sejak jaman penjajahan Inggris yang memaksa umat muslim untuk berada di wilayah utara, karena wilayah selatan terutama di daerah delta adalah wilayah yang kaya akan minyak. Inilah awal mula terjadinya diskriminasi terhadap umat muslim di Nigeria. Terlebih lagi ketika diberlakukan kebijakan Pax Brittanica yang mengatur agar setiap muslim yang akan bepergian atau membangun masjid harus mendapat ijin dari pemerintah kolonial, namun sebaliknya bagi umat kristiani tidak dikenakan ijin serupa

Setelah lepas dari masa penjajahan Inggris, Nigeria sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan terjadi pula beberapa kali kudeta yang dilakukan oleh militer. Pemilu pertama diadakan pada 1964 dan dimenangkan oleh Abubakar Tafalafa Balewa dari koalisi Northern People Congress (NPC), namun pemerintahan itu mengalami kudeta militer pada 1966. Pemilu kedua diadakan pada 1979 dan dimenangkan oleh Shehu Shagari dari National Party of Nigeria (NPN). Bahkan Shaqari juga memenangkan pemilu periode kedua tahun 1983, namun kemenangan itu tidak diakui oleh pihak militer, dan akhirnya terjadi lagi kudeta.

Setelah pemerintahan dari Shehu Shaqari dikudeta oleh militer, Nigeria menjadi negara yang dikuasai oleh rezim militer sampai lima belas tahun. Akhirnya pada 1998 dengan memanfaatkan momentum kematian pemimpin militer saat itu, Jenderal Sani Abacha maka membuka peluang lagi bagi Nigeria untuk kembali menjalankan pemerintahan demokrasi. Pemilu pun diadakan pada 1999 dan menghasilkan Jenderal (purn) Obasanyo sebagai Presiden. Nigeria menjadi sorotan dunia karena beberapa kali terjadi silih bergantinya kekuasaan dengan cara kudeta, dan ini bermula karena adanya pertentangan yang begitu tajam antara penganut Islam dan Kristen. Penyebab utamanya adalah jumlah penganut Islam dan Kristen yang berimbang, dan kekuasaan militer yang begitu dominan, serta kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Inggris dianggap tidak adil bagi kalangan Islam. Sejarah mencatat bahwa Nigeria pernah mengalami perang saudara selama 3 tahun antara 1967-1970.

Dengan seringnya pergantian kekuasaan dengan cara kudeta, maka koalisi dari beberapa partai berkuasa di Nigeria membuat kesepakatan yang mengatur kekuasaan di tingkat nasional digilir tiap dua kali pemilu, meskipun bukan kesepakatan tertulis resmi di undang-undang, namun

kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi diskriminasi salah satu pihak. Walaupun kesepakatan tersebut bukan aturan resmi, tetapi konstitusi di Nigeria sudah mengatur pembagian kekuasaan eksekutif, jika presiden beragama Islam, maka wakilnya beragama Kristen dan begitu pula sebaliknya.

Presiden yang terpilih berikutnya pada pemilu 2007 Yar'Adua adalah Umaru vang beragama Pemerintahan yang dijalankannya sebenarnya cukup baik, namun masalah kemudian terjadi saat Presiden Yar'Adua meninggal pada masa jabatan pertama karena sakit. Goodluck Jonathan vang beragama Kristen dan menjadi wakilnya saat itu naik menjadi Presiden. Padahal seharusnya berdasarkan kesepakatan, pengganti Presiden haruslah berasal dari yang beragama sama, akan tetapi karena saat itu sedang dalam masa berkabung dan tidak memungkinkan diadakan pemilu, maka Jonathan mengisi jabatan Presiden sampai pemilu selanjutnya. Untuk menghindari ketegangan atas dipilihnya Goodluck Jonathan, maka dia segera mengangkat Namadi Sambo sebagai wakil presiden yang beragama Islam.

Selanjutnya pada pemilu 2011 yang seharusnya calon Presiden harus dari umat muslim, Goodluck Jonathan maju mencalonkan diri dan menjadi kandidat dari partai yang cukup berkuasa di Nigeria yaitu *People's Democratic Party* (PDP). Majunya Jonathan itu tentu saja menjadi polemik karena dianggap telah melanggar kesepakatan tentang penggiliran masa jabatan. Namun komisi pemilihan Nigeria tetap menerima pencalonan Goodluck Jonathan sebagai calon Presiden dari PDP, karena dianggap tidak melanggar konstitusi. PDP sendiri mencalonkan Jonathan karena ada indikasi bahwa Jonathan mendapatkan dukungan dari pihak Amerika Serikat. Hasil pemilu 2011 akhirnya menunjukan Goodluck Jonathan meraih 59 persen suara mengungguli pesaing muslim dari wilayah utara Muhammadu Buhari yang hanya meraih 32 persen suara.

Komisi Pemilu Nigeria mengungkapkan Jonathan unggul lebih dari 10 juta suara atas pesaingnya, Muhammadu Buhari, Namun, Buhari menuding kemenangan Jonathan ini sarat kecurangan. Maka, sebagai aksi protes, para pendukung Buhari mengobarkan kekerasan di 13 negara bagian di Nigeria, melukai ratusan orang. Mereka membakar ban dan melempar batu ke arah pasukan keamanan. Muhammadu Buhari kandidat Congress for Progressive Change (CPC) memprotes hasil pemilu, sehingga terjadilah bentrokan antara pendukungnya dan pendukung partai berkuasa di negara-negara bagian utara Nigeria. Massa yang tidak puas terhadap perhitungan suara terlibat bentrok dengan tentara di Kano, kota terbesar di Negara Bagian Kano, utara Nigeria. Bahkan, aksi kerusuhan akhirnya meluas ke seluruh negara bagian tersebut. Kerusuhan juga meluas ke beberapa negara bagian di utara. Pasalnya, ada perbedaan yang tajam dalam perhitungan suara di wilayah utara dan selatan.

Muhammadu Buhari melanjutkan perselisihannya mengenai validitas proses pemungutan suara. Buhari mengatakan bahwa tidak ada proses pemungutan suara di kawasan Delta Niger dan wilayah tenggara Nigeria, dan bahwa para pendukungnya tidak diizinkan memberikan suara mereka. Tetapi, Buhari menyerukan agar rakyat tetap tenang, seraya mengatakan bahwa ketidakwajaran yang terjadi akan diselidiki oleh komisi pemilu. Berdasarkan konflik yang terjadi, data Palang Merah mencatat sedikitnya 500 orang tewas sekitar 25,000 orang mengungsi, dan 380 orang terluka. Polisi telah menahan puluhan orang dalam aksi kekerasan tersebut. Kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Kaduna, yang menjadi ibukota negara bagian bernama sama, karena para massa pendukung Buhari membakar barikade dari tumpukan ban mobil. Aparat keamanan melepaskan tembakan ke udara dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan sekelompok pemuda. Pemerintah kota Kaduna kini menetapkan larangan keluar rumah selama 24 jam, setelah sejumlah orang yang melakukan protes membakar kediaman Wakil Presiden Namadi Sambo di kota Zaria. Mereka juga memaksa masuk ke penjara pusat dan membebaskan narapidana

Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penulisan deskriptif atau studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data lebih difokuskan pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar elektronik, dan publikasi dari instansi-instansi terkait yang relevan dengan peristiwa dalam artikel ilmiah ini. Selain itu, data-data yang diperoleh berasal dari media internet sebagai penunjang informasi untuk keperluan analisis. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam artikel ilmiah ini adalah Teori Konflik Internal yang dijabarkan oleh Michael E. Brown untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik politik pasca pemilu 2011 di Nigeria.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Konflik politik di Nigeria dipicu oleh faktor terpilihnya Goodluck Jonathan sebagai presiden pada pemilu 2011, padahal seharusnya menurut kesepakatan yang menjabat sebagai presiden adalah dari kelompok yang beragama Islam. Namun sebenarnya ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab konflik politik di Nigeria, seperti struktur, politik, sosial dan ekonomi.

Gambaran Umum Nigeria

Nigeria adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika bagian barat. Negara ini berbatasan dengan Niger, Benin, Chad dan Kamerun. Dengan wilayah seluas 923.768 km², Nigeria merupakan negara dengan populasi paling padat dibandingkan negara-negara lain di Benua Afrika. Diperkirakan pada tahun 2003, penduduk Nigeria mencapai 133.881.700 orang. Sementara tingkat peningkatan

penduduknya berkisar 2,52% per tahun. Republik Federal Nigeria semula beribukota Lagos, namun pada Desember 1991 dipindah ke Abuja (bagian tengah Nigeria). Wilayah Nigeria terbagi atas 36 *states* dan 1 *territory*

Dalam perjalanannya, penguasa militer di Nigeria gagal mengembangkan ekonomi dan membebaskan ketergantungan ekonominya dari perdagangan sektor minyak yang intensif modal. Sektor pertaniannya juga tidak berhasil diberdayakan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, sehingga Nigeria yang dulu pernah menjadi negara pengekspor makanan, kini malah menjadi pengimpor bahanbahan pangan. Nigeria termasuk 20 negara paling miskin di dunia sekaligus berada di bawah GNP rata-rata negara sub-Sahara Afrika, yakni US\$900 pada 2003 dan 60% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Nigeria menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai negara. Mitra dagang utama (90%) komoditi ekspor Nigeria adalah AS dan negaranegara Eropa (Spanyol, Itali, Jerman, Belanda, dan Perancis). Sementara mitra impornya adalah negara-negara di kawasan Eropa dengan kisaran 60% dari total transaksi impor (separuhnya adalah komoditi asal Inggris), dan sisanya hampir 20% dari AS dan Jepang. Hanya 5,2% ekspor dan 0,8% impor Nigeria dilakukan bersama negaranegara Afrika lainnya.

Sebagai Negara multi kultural, Nigeria memiliki banyak etnis dan suku serta bahasa daerah. Lebih dari 250 jenis kelompok etnis dan suku yang ada disana dengan tiga jenis kelompok utama, yaitu Hausa-Fulani sebanyak 30% yang umumnya bertempat tinggal di wilayah utara, bersama sukusuku kecil lainnya seperti suku Angas, Bachana, Birom, Idoma, Igbira, Ighala, Jukun Gwari, Kanupi dan Nupe. Sedangakan suku Yoruba yang berjumlah sekitar 20% bermukim di wilayah barat bersama suku kecil lainnya seperti Edo, Ijaw, Ighata, Igbira dan Urhobo. Serta kelompok suku terberbesar yang terakhir adalah suku Ibo sebanyak 17% yang mendiami wilayah timur bersama sukusuku Efik, Ibibio, Ekoi, Calabar, Ogoja, Rivers, Ijaw, dan Kalabari.

Berdasarkan pada tiga kelompok terbesar itu pula pada masa kolonial, pemerintahan kolonial Inggris membagi Nigeria menjadi tiga bagian, yaitu wilayah utara, wilayah barat, dan wilayah timur. Hingga pada masa-masa awal kemerdekaan, Nigeria yang berbentuk federal juga terdiri dari tiga negara bagian. Mayoritas masyarakat Nigeria menganut agama Islam dan Kristen, sebanyak 50% menganut Islam, 40% menganut Kristen dan 10% sisanya memeluk kepercayaan lokal. Masyarakat yang memeluk agama Islam kebanyakan berdomisili di Nigeria bagian utara dan penganut Kristen berada di bagian selatan. Pembagian wilayah ini dimulai sejak pemerintahan kolonial dari penjajah Inggris yang memaksa masyarakat muslim untuk mendiami daerah utara karena mereka ingin menguasai wilayah selatan yang kaya akan sumber minyak.

Etnis-etnis yang ada di Nigeria seringkali terlibat perselisihan. Perselisihan ini lebih sering dipicu oleh sentiment etnis, agama, dan perbedaan dalam distribusi hasil pembangunan. Perbedaan sistem sosial antara etnis yang berada di utara (Hausa-Fulani), dan etnis yang berada di selatan (Igbo dan Yoruba) serta kebijakan yang berbeda yang diterapkan sejak jaman pemerintahan kolonial Inggris pada 1914 pada aspek pembangunan membuat kesenjangan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan teknologi Etnis Igbo memiliki tingkat perkonomian, pendidikan, dan teknologi lebih baik daripada etnis lain di utara. Ladang minyak mentah banyak terdapat di wilayah etnis Igbo, sehingga etnis Igbo merasa memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang perekonomian negara. Tetapi warga etnis Igbo merasa pemerintah (yang sebagian besar didominasi warga etnis utara) tidak memberikan distribusi hasil minyak sebagaimana mestinya. Ketidakadilan dalam distribusi pembangunan ini mengakibatkan konflik antara etnis utara dan selatan. Sejak awal 1990an konflik etnis sering terjadi di Nigeria. Dari wilayah selatan ke utara, atau barat ke timur, nyaris tidak ada kota yang luput dari kerusuhan. Ketegangan selalu memuncak saat terjadi pergeseran keseimbangan hubungan sosial politik yang ada.

Sistem Politik Dan Pembagian Kekuasaan

Berbagai kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat Nigeria juga mempengaruhi sistem perpolitikan di Nigeria. Bermacam etnis dan suku dengan sistem sosial yang berbeda, sentimen yang muncul karena perbedaan agama, dan tingkat distribusi dalam pembangunan mewarnai perpolitikan di Nigeria. Sejak kemerdekaanya pada 1 oktober 1960, Nigeria mewarisi sistem pemerintahan federal ala Inggris. Pemerintahan kolonial Inggris kala itu membagi wilayah Nigeria menjadi 3 bagian berdasarkan 3 etnis terbesar yang ada. Pembagian ini dimaksudkan untuk menghindari rekonsiliasi regional serta mengakomodasi kepentingan etnis-etnis yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan kolonial Inggris berusaha untuk mencegah terjadinya ketegangan antar etnis yang bisa membahayakan kekuasaannya di wilayah Nigeria.

Nigeria telah menjalani proses yang panjang dan berliku dalam proses pembelajarannya untuk menuju kepada demokrasi. Ketidaksabaran para pendiri negara ini dalam membangun pengertian dan kepercayaan telah merembet kedalam masyarakat bawah dalam bentuk saling curiga telah menimbulkan konflik etnis, agama dan primordial. Proses panjang tersebut menjadikan Nigeria memiliki sejarah panjang mengenai pembagian kekuasaan. Dari data sejarah, ada beberapa unsur utama yang mempengaruhi pembagian kekuasaan di Nigeria: sosial, ekonomi, sejarah, dan politik. Unsur-unsur tersebut telah dikembangkan secara terpisah, namun sangat terkait dengan berbagai kelompok etnis dan sumber daya minyak yang sangat besar.

Pembagian kekuasaan di Nigeria bertujuan untuk melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah negara federal adalah untuk memberi masyarakat atau eklompok etnis setempat dalam pengambilan keputusan atas wilayah mereka sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat. Idealnya, Federalisme harus menghambat pusat dari menjadi terlalu kuat. Pembagian pendapatan telah diterapkan sehingga wilayah Niger Delta tidak akan menjadi jauh lebih

kaya dari seluruh negara dan mungkin memisahkan diri dan mengambil sumber daya minyak luar negeri.

Sejarah Konflik dan Kudeta

Nigeria merdeka dari Inggris pada 1 Oktober 1960 dengan Alhaji Talafa Balewa menjadi perdana menteri dan Nnamdi Azikiwe sebagai gubernur jenderal pertama. Namun Nigeria yang sebelumnya menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris memutuskan untuk keluar dan pada 1963 Nigeria mendeklarasikan diri sebagai negara republik federal. Nnamdi Azikiwe yang sebelumnya menjadi gubernur jenderal kini menjabat sebagai presiden dan Talafa Balewa tetap menjadi perdana menteri.

Pada Desember 1964 diadakan pemilu pertama setelah kemerdekaan yang diikuti oleh 11 partai politik. Namun hasil pemilu ini diboikot oleh kubu UPGA yang menganggap bahwa pemilu berlangsung curang dengan tuduhan koalisi NNA pasti akan memenangkan pemilu karena berasal dari wilayah dengan basis penduduk yang besar. Atas tudingan adanya kecurangan tersebut, beberapa kelompok militer yang berasal dari Nigeria timur yang dipimpin oleh Jendral Johnson Aguiyi-Ironsi melakukan kudeta yang menewaskan perdana menteri Balewa, dan sejak saat itu Nigeria berada di bawah pemerintahan rezim militer

Pada Juli 1966 terjadi kudeta balasan dengan kelompok yang lebih besar dari militer Utara pimpinan Mayor Jenderal Yakubu Gowon. Kudeta ini menewaskan Aguiyi-Ironsi dan menumbangkan pemerintahan singkatnya. Konflik tidak berhenti disini, kudeta kembali terjadi. Yakubu Gowon yang dituduh terlibat korupsi dan dinilai tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pemerintahan kepada rakyat sipil digulingkan oleh Jenderal Murtala Mohammed pada Juli 1975. kemudian pada 1985 terjadi kudeta lagi dan kali ini Nigeria dikuasai oleh Jenderal Ibrahim Babangida.

Pada 1993 pemerintahan babangida mengadakan pemilu, Namun hasil pemilu ini tidak diakui oleh Babangida dan dia membatalkan hasil pemilu. Hal ini kemudian menimbulkan kerusuhan yang memakan korban lebih dari 100 orang sebelum akhirnya Babangida menyerahkan kekuasaan sementara pada tokoh masyarakat terkemuka saat itu Ernest Shonekan.

Shonekan dipercaya untuk memimpin Nigeria sampai pemilu berikutnya pada Februari 1994. Tetapi Shonekan tidak dapat mengatasi kondisi ekonomi dan mengurangi ketegangan politik. Ditengah kondisi negara yang sedang tidak stabil, menteri pertahanan Jenderal Sani Abacha membuat skenario pengunduran diri Shonekan pada November 1993. Abacha yang kemudian memegang kendali negara kemudian membubarkan semua institusi demokratis dan mengganti semua gubernur negara bagian yang terpilih melalui pemilu dengan militer.

Abacha kemudian meninggal secara mendadak akibat serangan jantung pada 8 Juni 1998, dan kepemimpinannya digantikan oleh Jenderal Abdulsalami Abubakar. Untuk menciptakan perdamaian Nigeria, Abubakar membebaskan semua tahanan politik, membatalkan hasil pemilu sebelumnya, dan menunjuk komisi pemilihan yang baru

Independent National Electoral Commission (INEC) untuk menyelenggarakan pemilu gubernur, legislatif, dan presiden. INEC sukses menyelenggarakan pemilu ditahun 1999 dengan tiga partai peserta pemilu yang sudah memenuhi syarat, yaitu People's Democratic Party (PDP), All People's Party (APP) dan Alliance for Democratic Party (ADP). Olegun Obasanjo seorang purnawirawan Jenderal yang dicalonkan oleh PDP memenangkan pemilu ini. Setelah pemilu ini pemerintahan transisi Abubakar mengumumkan secara resmi terpilihnya presiden sipil yang baru

Pelaksanaan Pemilu 2011

Komisi pemilihan umum Nigeria memutuskan pemilihan presiden negara itu akan berlangsung pada 22 Januari 2011. Pemilu ini diadakan untuk memilih presiden setelah presiden Umaru Yar'Adua meninggal dan jabatan presiden dipegang sementara oleh Goodluck Jonathan yang saat itu menjadi wakilnya. Banyak pihak yang sebenarnya pesimis dan meragukan proses pemilu ini, sebab pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada tuduhan kecurangan dan penggelumbungan suara. Belum lagi dengan kontroversi majunya Goodluck Jonathan sebagai calon yang diusung oleh partai berkuasa yaitu PDP, padahal seharusnya menurut kesepakatan rotasi bersama, presiden yang akan memimpin berikutnya adalah presiden dari kalangan umat muslim.

Meskipun pemilu ini akhirnya harus diundur hingga 16 april, tapi pemilu berjalan damai dan lancar. Pemilu menghasilkan Goodluck Jonathan memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebanyak 58%, mengungguli pesaing terdekatnya Muhammadu Buhari yang memperoleh 31% suara atau unggul lebih dari 10 juta suara. Setelah hasil ini diumumkan, kerusuhan pecah di beberapa negara bagian. Tuduhan manipulasi surat suara mendorong warga turun ke jalan di Kaduna dan Sokoto. Buhari mengatakan kepada VOA siaran bahasa Hausa, bahwa tidak ada proses pemungutan suara di kawasan Delta Niger dan wilayah tenggara Nigeria, dan bahwa para pendukungnya tidak diizinkan memberikan suara mereka. Tetapi, Buhari menyerukan agar rakyat tetap tenang, seraya mengatakan bahwa ketidakwajaran yang terjadi akan diselidiki oleh komisi pemilu

Warga Muslim pendukung Muhammadu Buhari, telah menyerang gereja-gereja, rumah-rumah, kantor-kantor polisi serta kantor penyelenggara pemilu. Kekerasan itu telah menyulut serangan balasan oleh orang-orang Kristen. Laporan-laporan media mengatakan lebih dari 100 orang tewas dalam kekerasan itu, meskipun para pejabat menolak untuk memberikan angka kematian karena khawatir hal itu akan menyebabkan terjadinya lebih banyak serangan. Pemerintah kemudian merespon dengan mengerahkan aparat keamanan untuk mengamankan sejumlah kota di bagian utara. Tentara melepaskan tembakan ke udara dan mengerahkan helikopter yang terbang rendah di sejumlah kota.

Faktor Penyebab Konflik Pasca Pemilu 2011 di Nigeria

Konflik politik antara kelompok agama Islam dan Kristen di Nigeria ini dikarenakan oleh terpilihnya Goodluck Jonathan yang beragama Kristen pada pemilu 2011 menggantikan Umaru Yar'Adua presiden sebelumnya yang beragama Islam namun meninggal karena sakit. Untuk menjawab masalah tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, penulis menggunakan teori konflik internal yang dikemukakan oleh Michael E Brown. Dalam teorinya, Brown menjelaskan bahwa ada empat faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya konflik internal. Keempat faktor tersebut adalah struktur, politik, sosial-ekonomi, dan kultur. Keempat faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama (underlying causes) dan juga penyebab pemicu (proximate causes)

Struktur (Lemahnya Negara dan Demografi Etnis)

Jika dilihat dari sejak berdirinya Nigeria, negara ini seringkali berganti pemimpin dengan cara kudeta. Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa babak pemerintahan sipil di Nigeria ditandai dengan republik pertama hingga keempat saat ini. Mulai dari masa pemerintahan presiden Balewa hingga presiden Goodluck Jonathan sekarang, Nigeria tidak pernah lepas dari konflik kerusuhan. Adanya ketidakpercayaan ketidakcocokan pemimpin sipil dan militer membuat terjadinya kudeta tersebut. Karena masa pemerintahan yang hanya sebentar, para pemimpin tersebut tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan konsolidasi demokrasi atas etnis dan suku-suku Nigeria yang beragam. Maka dari itu, legitimasi pemerintah pusat dipandang sangat rendah dimata rakyat Nigeria dan membuat posisi negara menjadi lemah karena rakyat hanya berjuang demi kepentingan kelompoknya masing-masing.

Dipecahnya Nigeria dari 3 negara bagian (1960) menjadi 4 (1963), 12 (1967), 19 (1976), 30 (1993) dan 36 (1996) telah membuat primordialisme kedaerahan yang baru pula dimana setiap negara bagian merasa memiliki kewenangan untuk mengatur tiap bagiannya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat setempat. Di wilayah utara yang mayoritas penduduknya muslim, tuntutan dan aspirasi itu diwujudkan dalam bentuk diberlakukannya hukum syariat Islam di beberapa negara bagian utara. Meskipun pemerintah setempat tetap menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya dan kewajiban syariat Islam ini hanya berlaku pada yang umat muslim, namun banyak mendapat protes dari kalangan penduduk yang beragama Kristen. Tetapi sayangnya protes penduduk Kristen tersebut ditanggapi oleh penduduk muslim dengan cara mengusir penduduk Kristen tersebut baik secara halus maupun terang-terangan sehingga menimbulkan konflik antar agama. Malahan sering terjadi pula konflik balasan kelompok Kristen di selatan terhadap kelompok muslim yang menetap di negara bagiannya

• Politik (Diskriminasi dan Transisi Politik)

Adanya diskriminasi politik dari pemerintah berkuasa atau kelompok mayoritas terhadap kelompok tertentu akan menimbulkan solidaritas anggota kelompok yang terdiskriminasi untuk mengadakan perlawanan. Ideologi nasional dapat menjadi penyebab timbulnya kekerasan konflik internal apabila tidak menampung dan melindungi seluruh kepentingan kelompok atau hanya didasarkan pada kepentingan kelompok berkuasa saja.

Jika dirunut kebelakang, maka pemerintah kolonial Inggris adalah pihak yang bertanggung jawab atas awal mula terjadinya diskriminasi di Nigeria. Penduduk muslim yang tidak mau menerima kedatangan misionaris Kristen pada masa itu dipaksa untuk pindah ke wilayah utara, padahal itu hanya kedok Inggris untuk menguasai wilayah selatan yang kaya minyak. Diskriminasi semakin terasa ketika diberlakukannya kebijakan *Pax Brittanica* yang mengatur agar setiap muslim yang akan bepergian atau membangun masjid harus mendapatkan izin dari pemerintah kolonial. Namun sebaliknya, bagi pemeluk Kristen tidak dikenakan izin serupa

Para misionaris Kristen yang ditolak kedatangannya oleh masyarakat muslim utara tersebut selain menyebarkan agama juga memberikan pendidikan barat kepada masyarakat wilayah selatan. Ini tentu saja membuat ketimpangan pendidikan antara masyarakat utara dan selatan, meskipun masyarakat utara mendapat pendidikan serupa setelah masa kemerdekaan. Selain itu potensi minyak berlimpah di daerah selatan menyebabkan yang meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh bagian yang merata untuk pengembangan ekonomi. Ketidakmerataan alokasi penduduk, sumber daya alam, distribusi ekonomi, pendidikan dan diikuti oleh perbedaan agama inilah yang memperuncing konflik di Nigeria serta menjadi salah satu faktor penyebab utama konflik (underlying causes).

Selain itu masalah transisi politik inilah yang menjadi penyebab pemicu terjadinya konflik kelompok agama pasca pemilu 2011 di Nigeria. Hal ini disebabkan terpilihnya Goodluck Jonathan menjadi presiden pada pemilu 2011, umat Islam menganggap pemimpin Nigeria saat ini harusnya dari kalangan yang beragama Islam juga, karena masa kepemimpinan presiden sebelumnya yaitu Umaru Yar'Adua berakhir disebabkan oleh kematian, bukan karena masa jabatan yang habis.

Kemenangan Goodluck Jonathan pun mengundang dugaan kecurangan pada pemilu yang dituduhkan oleh pesaingnya, yaitu Muhammadu Buhari dan mengakibatkan para pendukungnya yang tidak terima akhirnya mengobarkan kekerasan di beberapa negara bagian. Kemudian penyebab pemicu dari faktor politik adalah transisi politik dan kompetisi antar kelompok. Dalam hal ini pemilu 2011 yang dimenangkan oleh Goodluck Jonathan-lah yang menjadi alasan utama penyebab pemicu (proximate causes) konflik antar kedua kelompok agama. Masyarakat yang beragama Islam tidak terima jika presiden terpilih beragama Kristen

karena dianggap melanggar kesepakatan yang mengatur tentang penggiliran kekuasaan.

• Permasalahan Sosial dan Ekonomi

Setelah mendapatkan pemerintahan yang demokratis, rakyat Nigeria berharap akan terbaginya secara lebih merata keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi yang tidak tampak pada pemerintahan militer sebelumnya. Dengan telah disahkannya undang-undang anti korupsi pada masa pemerintahan Presiden Obasanjo dan telah disetujui oleh majelis nasional pada oktober 1999, maka undang-undang itu akan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memerangi korupsi. Pemerintahan Obasanjo juga telah menyita beberapa aset dan property yang dimiliki oleh para mantan penguasa militer, seperti Jenderal Ismaila Gwarzo yang memiliki 50 properti di Abuja. Sementara Jenderal Sani Abacha beserta keluarganya diduga memiliki kekayaan US\$ 800 juta yang disimpan didalam rekening bank didalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari sumber daya alamnya, Nigeria tidak bisa dikatakan sebagai negara miskin. Potensi kekayaan negara ini memang terdapat pada minyak. Nigeria tercatat sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di dunia dan menjadi salah satu anggota dari negara-negara pengekspor minyak dunia atau OPEC. Produksi minyak Nigeria mencapai 2,256 juta barel/hari dengan konsumsi dalam negerinya 275 ribu barel/hari

Etnis-etnis yang ada di Nigeria seringkali terlibat perselisihan. Perselisihan ini lebih sering dipicu oleh sentimen etnis, agama, dan perbedaan dalam distribusi hasil pembangunan. Perbedaan sistem sosial antara etnis yang berada di utara (Hausa-Fulani), dan etnis yang berada di selatan (Igbo dan Yoruba) serta kebijakan yang berbeda yang diterapkan sejak jaman pemerintahan kolonial Inggris pada 1914 pada aspek pembangunan membuat kesenjangan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan teknologi. Etnis Igbo memiliki tingkat perkonomian, pendidikan, dan teknologi lebih baik daripada etnis lain di utara. Ladang minyak mentah banyak terdapat di wilayah etnis Igbo, sehingga etnis Igbo merasa memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang perekonomian negara. Tetapi warga etnis Igbo merasa pemerintah tidak memberikan distribusi hasil minyak sebagaimana mestinya.

Ketidakadilan dan perasaan terdiskriminasi dalam distribusi pembangunan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antara etnis utara dan selatan. Sejak awal 1990an konflik etnis sering terjadi di Nigeria. Dari wilayah selatan ke utara, atau barat ke timur, nyaris tidak ada kota yang luput dari kerusuhan. Ketegangan memuncak terjadi selalu saat pergeseran dalam keseimbangan hubungan sosial politik yang ada. ekonomi Permasalahan sosial dan yang semakin menggunung inilah yang akhirnya menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik internal di Nigeria.

Daftar Pustaka

- Aas Rustad, Siri. 2008. *Power-sharing and Conflict in Nigeria*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Arnold, Hans. 1991. The Century of Refugee, dalam *A European Country Aussen Pol.* Vol 2 No 3.
- Bahr S, Lauren and Johnston, Bernard. *Collier's Encyclopedia with Bibliography and Index*. PF Collier, vol 17. USA.
- Boyd, Andrew and van Resburg, Patrick. 1966 *An Atlas of African Affairs: Nigeria*. New York. Frederick A Praeger Publisher.
- Bratanidjaja, Rahmat. 1990. *Ensiklopedi Geografi* seri *Indonesia*. Jakarta. PT. Intermasa.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik:* Sebuah Bunga Rampai. Jakarta. PT. Gramedia.
- Dam, Syamsumar. 1994. *Perkembangan Sistem Politik di Afrika: Nigeria*. Jakarta. FISIP UNAS.
- Danspeckgruber, Wolfgang. 2000. *Self-Determination, Self-Governance and Security*. International Relations. Vol XV no 1. April
- Dent, Martin. 1995. Ethnicity and Territorial Politics in Nigeria dalam Graham Smith (ed): FEDERALISM: The Multi Ethnic Challenge. London. Longman.
- E Brown, Michael. 1996. *The International Dimension of Internal Conflict*. Cambridge: MIT Press.
- Falola, Toyin and Heaton, Matthew. 2008. *A History of Nigeria*. Cambridge. Cambridge University Press.
- FISIP UNEJ. 2012. *Pedoman Studi Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013*. Jember: FISIP UNEJ.
- Magbadelo, John Olushola. 2000. *The Quest for Democraric Consolidaton in Nigeria*. New Delhi. Indian for Cultural Relations.
- Miall, Hugh. 1999. Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflict. Polity Press.
- Sudira, I Nyoman. 2003. *Teori Konflik: Sebuah*Penghampiran dan Dasar Pemahaman, dalam Jurnal
 Pacis No.2 Thn 1.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.

UNEJ. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Media Internet:

- "Nigeria" http://www.an-najah.net/index.php?
 option=com_content&view=article&id=127:niger&catid=67
 jelajah&Itemid=89 diakses tanggal 26 september 2012
- "Sejarah Daftar Perang" http://indonesiaindonesia.com/f/87897-sejarah-daftar-perang-pernah-terjadi-dunia/index6.html diakses tanggal 30 juni 2012
- "Goodluck Jonathan Presiden Baru Nigeria" http://www.voaindonesia.com/content/abhisit--92949979/77146.html diakses tanggal 30 juni 2012
- "Pemilu Nigeria Berakhir Ricuh" http://www.suara-islam.com/news/berita/internasional/2518-pemilu-nigeria-berakhir-rusuh diakses tanggal 30 juni 2012
- "Incumbent Unggul Pilpres, Nigeria Dilanda Kerusuhan" http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/39-internasional-news/10135-incumbent-unggul-pilpres-nigeria-dilanda-kerusuhan.html diakses tanggal 20 juli 2012
- "Kandidat Oposisi Nigeria Permasalahkan Hasil Pemilu" http://www.voaindonesia.com/content/kandidat-oposisi-nigeria-memperselisihkan-hasil-pemilu-120282819/92287.html diakses tanggal 26 september 2012
- "Kerusuhan Setelah Pemilu di Nigeria" http://www.dw.de/dw/article/0,14998723,00.html diakses tanggal 20 juli 2012